

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami disinterpretasi mengenai isi dari proposal skripsi ini maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan judul proposal skripsi secara detail. proposal skripsi ini berjudul Gadai Tanaman Di Atas Hutan Kawasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Hutan Kawasan Desa Baru Ranji, Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan).

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Gadai adalah salah satu perjanjian dimana menjadi suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. jaminan adanya barang disini untuk memperkuat kepercayaan dari orang yang memberikan hutang kepada yang berhutang¹.
2. Hutan kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²
3. Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Quran dan

¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.193

²UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

As-Sunnah serta diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam³.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana status hukumnya menurut hukum Islam tentang gadai tanaman dalam hutan kawasan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan mengapa penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (uang) tak jarang orang menggadaikan sesuatu yang dimilikinya
- b. Permasalahan mengenai gadai sudah banyak terjadi khususnya di kawasan hutan lindung di kota Bandar Lampung yakni mengenai ketidak jelasan hukum menggadaikan tanaman di hutan kawasan karena terdapat dua pemahaman didalamnya;
- c. Sebagian warga Desa Baru Ranji menggadaikan tanamannya di atas hutan kawasan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa literatur yang mendukung pembahasan judul ini cukup tersedia, sehingga besar kemungkinan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid Satu*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

- b. Bahwa masalah ini masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian di Fakultas Syariah, terkhusus jurusan Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Hutang piutang terkadang tidak dapat terhindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman sekarang ini. sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara *Rahn* (Gadai). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut.

Gadai dalam *fiqih* disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sebagai tebusan. gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, sehingga orang tersebut diperbolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang gadaian. namun kepemilikan atas barang tersebut tetap milik *rahin* (yang mengadaikan), sehingga *murtahin* (pemegang

gadai) tidak memiliki kuasa atas barang tersebut, baik dijual, dipinjamkan, disewakan dan diambil manfaatnya⁴.

Praktik pelaksanaan gadai tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan gadai tanaman di atas hutan kawasan di Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan sejauh ini praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan Syari'at Islam. Karena pada saat masyarakat di Desa Baru Ranji membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktik gadai tanaman tetapi tanaman yang digadaikan tersebut belum memiliki izin dari pemerintah. pasalnya tanaman yang digadaikan berada dalam hutan kawasan lindung.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di jelaskan di dalam pasal I ayat 8 yang berbunyi “hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”⁵.

Berdasarkan penjelasan yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan pergadaian tersebut, sehingga dapat ditemukan solusinya dan diketahui kepastian hukumnya, terutama jika ditinjau menurut perspektif hukum Islam. maka judul skripsi ini adalah :

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.187

⁵*Ib.id.*

Gadai Tanaman Di Atas Hutan Kawasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Hutan Kawasan Desa Baru Ranji, Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Gadai Tanaman Di Atas Hutan Kawasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Hutan Kawasan Desa Baru Ranji, Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan)”.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pemikiran di atas, yang menjadi rumusan masalah dari judul tersebut, adalah:

1. Bagaimana status hukum menggadaikan tanaman di atas hutan kawasan ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman di atas hutan kawasan ?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui status hukum mengadaikan tanaman di atas hutan kawasan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang gadai tanaman di atas hutan kawasan.

b) Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis : bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya pembaca mengetahui status hukum gadai tanaman di atas hutan kawasan.
- b. Secara teoritis : menambah kekayaan hazanah kepustakaan studi hukum Islam.

G. Signifikasi Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasannya meliputi: Penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, metode penelitian.

Bab II Landasan Teori. Pembahasannya meliputi: Kajian teori yang terdiri dari pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya akad gadai, hutang piutang dengan jaminan yang terdiri dari pengertian

hutang piutang, dasar hukum Al-Qardg, rukun & syarat Al-Qardh, pembayaran pinjaman, posisi jaminan antara utang piutang dan *rahn* (gadaai) dan tinjauan pustaka.

Bab III Laporan Hasil Penelitian. Pembahasannya meliputi: gambaran umum hasil penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Desa Baru Ranji, letak geografis Desa Baru Ranji, letak geografis Desa Baru Ranji, keadaan demografis Desa Baru Ranji. Kemudian status hutan kawasan yang terdiri dari pengertian hutan kawasan, jenis-jenis hutan kawasan, pemanfaatan hutan kawasan. Kemudian Pelaksanaan gadai tanaman di atas hutan kawasan di Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan Hasil Wawancara dari *Rahin*, *Murtahin* dan Pejabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV Analisa Data. Pembahasannya meliputi: Praktik gadai tanaman di atas hutan kawasan di Desa Baru Ranji dan perspektif hukum islam tentang gadai tanaman di atas hutan kawasan di Desa Baru Ranji.

Bab V Penutup. Pembahasannya meliputi: Kesimpulan dan rekomendasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan sifat penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang *Rahn*. Termasuk juga data primer hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

Sedangkan penelitian study kasus ini bersifat deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi peristiwa dengan analisa tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam pengertian deskriptif, dititik beratkan kepada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel⁶.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti.

⁶Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pyshologi UGM, 1983), h.136

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 168 orang yang terdiri dari 168 warga pemilik tanaman di atas hutan kawasan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sample, penulis menggunakan rumusan sample yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka diambil seluruhnya sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika besar subjeknya melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dari penelitian ini melebihi dari 100 orang maka populasi tersebut diambil sebanyak 15% sehingga jumlah sampelnya adalah $15\% \times 168 \text{ orang} = 25 \text{ orang}$ Terdiri dari 10 Rahin, 4

Murtahin, dan 3 dari Dinas Kehutanan. Penulis menggunakan metode yaitu teknik random sampling. Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel secara acak dimana semua populasi punya kesempatan untuk menjadi objek.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide⁷.

Metode ini dipergunakan sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipergunakan bebas terpimpin, yaitu peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasan serta kebebasan dalam mengemukakan jawabannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanaman yang berada didalam hutan kawasan tersebut, seperti data

⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.102

primer yaitu data yang berasal dari lapangan dan data sekunder yang diambil dari data pustaka dengan cara membaca dan mereferensi.

5. Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses mengolahan data adalah :

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut *dijabarkan* dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

b. Penyusun Sistematis Data (*sistematizing*)

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

a. Berfikir Induktif

Induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

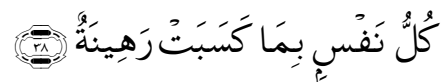
1) Pengertian Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai.⁸

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *ar-*

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.105.

Rahn menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* yaitu tetap dan kekal. Ada yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat. Sebagian ulama⁹ memberikan arti *Ar-Rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan. *Ar-Rahn* terdapat dalam Q.S Al- muddatstsir, ayat : 38,



Artinya : “*tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya*”⁹

makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Secara terminologi fiqh, *Rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut. Jadi Secara umum, *Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.¹⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah Saw. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan- akan berhutang kepada Allah Saw. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Saw untuk membebaskan dirinya. Setiap pribadi diminta pertanggungan jawab diakhirat kelak,

⁹Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), h. 992.

¹⁰Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis* (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), h. 115.

dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.¹¹

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*Rahn*) sebagai berikut:

a) Ulama" Syafi"iyah

Syafi"iyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq memberikan definisi gadai (*Rahn*) sebagai berikut:

Artinya: Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

b) Ulama" Hanabilah

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya gadai adalah :

Artinya: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup

¹¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 309.

membayar utangnya.¹²

c) Ulama" Malikiyah

Madzab Malikiyah mendefinisikan gadai sebagaimana dikutip oleh Wahbah az Zuhaili adalah :

Artinya: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

d) Ulama" Hanafiah

Sementara itu Hanafiah mendefinisikan gadai sebagai:

Artinya: Sesungguhnya *Rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, *ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang.¹³ Sementara pendapat Muhammad Rawwas Qal"ahji berpendapat bahwa *ar-Rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang. Sedangkan menurut Masjfuq Zuhdi *ar-Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Nasrun Haroen menegaskan *ar-Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan

¹²Al-Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 397

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), h. 286

sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya. Dan menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.¹⁴

Sementara gadai menurut KUH Perdata adalah :

Pasal 1150 : Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkannya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁵

Dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa Gadai menurut bahasa penahanan, sedangkan menurut *syar'i* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

¹⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008), h. 297.

utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

2) Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang-piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama" serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Dalil Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

¹⁶Departemen Negara RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya . . . , h. 49

Ayat ini menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepegian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

b) Hadits

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam haditsHal inipun dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A'isyah dalam pernyataan beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁷

Artinya “*Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang*

¹⁷Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitab Al-Aziz, Karya Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, h. 366

dan menggadaikan baju besinya.” (HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603)¹⁸

c) Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah. Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan berpergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *Rahn* dilakukan pada waktu berpergian. Dalam hal ini, ketika saat berpergian bahwa tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.¹⁹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama" Indonesia (DSN-MUI) Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, cet. Ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 56.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, h. 154.

Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi menjelaskan bahwa hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-Muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan *murtahin* (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin* (penggadai).²⁰

3) Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

a) Rukun Gadai

(1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab II bahwa yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *Murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

²⁰SDN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, Cet. 4, ed. 4, 2006), h. 153

(2) *Ma'qud 'alaih* (Obyek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *Marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *Marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

(3) *Sighat* (Akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.

b) Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya²¹:

(1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).

(2) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

²¹Muhamad Nawawi Al-jawiy, *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002) h. 276.

(3) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah SWT QS. An-Nisa, ayat : 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”²²

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan *qabul*.

(4) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

Al-Ahliyyah disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., h. 249.

boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.²³

(5) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

(a) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- Agunan itu milik sah debitur.
- Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik

²³Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 58-85

orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

- Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

(b) *Marhun Bihi* (utang)

Ketentuan yang berkaitan dengan *Marhun bihi* (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.²⁴

(c) *Sighat* (Akad Gadai)

Berupa perkataan *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00 dan yang satu lagi menjawab aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.²⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* juga dapat dilakukan dengan:

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), h. 22.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 107.

- Secara lisan

Kata adalah cara untuk mengatakan keinginan seseorang yang paling alami. Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab qabul* dinyatakan secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memahami *sighat* tersebut, maka tidak ditentukan bahasa apa yang harus dipakai.

- Dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di suatu tempat, maka akad itu maka dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *Ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika *ijab* tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, *qabul* harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos.

- Dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat, dengan syarat pihak tersebut tidak dapat menulis.

- Dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain cara lisan, tertulis atau isyarat adalah dengan cara perbuatan. Yaitu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu mengharapkan suatu yang diinginkan.²⁶

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.²⁷

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat*, *aqid* dan *ma'qud 'alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

c) Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

(1) Hak dan Kewajiban penerima gadai (*Murtahin*)

(a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 68-70.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh. . .*, h. 291.

marhun (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

(b)*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

(c)Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,

(d)Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(e)Penjualan *marhun*

- Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

(2) Hak Pemberi gadai (*rahin*)

- (a) Pemebri gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- (b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- (c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- (d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:²⁸

- Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

d) Pemanfaatan Barang Gadai

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian

²⁸Ib.id., h. 41

dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.²⁹

Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dikemukakan di atas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

e) Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *Rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *Rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.³⁰

Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti :

- (1) *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab

²⁹Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum . . .*, h. 376.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan, t.th), h. 190.

borg merupakan jaminan utang, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seijin *rahin*.

(2) Dipaksa menjual *borg*

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak.

(3) *Rahin* melunasi semua hutang.

(4) Pembebasan hutang.

(5) *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahin* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

(6) *Borg* rusak

(7) *Tasharruf* dan *Borg*

Gadai dipandang habis apabila jaminan *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atau ijin pemiliknya.

2. Hutang Piutang dengan Jaminan

a. Pengertian Hutang Piutang

Di dalam fiqh Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang

diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Atau dengan kata lain, Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya pinjam-meminjam hukumnya sunnah bila dalam keadaan normal.

b. Dasar Hukum Hutang Piutang

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*'Ariyah*) adalah sunnah. Sedangkan menurut Arruyani, sebagaimana dikutip Taqiy Addin bahwa *'Ariyah* hukumnya wajib. Memberikan hutang hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya, menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam bermasyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah, ayat : 2,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”³¹

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain selain dari Al-Qur'an, landasan hukum yang kedua ialah Al-Hadist, dalam landasan ini Al-Qardh dinyatakan sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ³²

Artinya: “Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya.” (HR Al-Bukhari no. 2387)³³

c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Menurut Hanafiah, rukun al-Qardh adalah satuyaitu *Ijab dan Kabul*, tidak wajib diucapkan tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan. Menurut Syafi'iyah, rukun dari al-Qardh adalah sebagai berikut;

- 1) Kalimat atau Lafazh “Saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “Saya mengaku berutang benda tersebut kepada kamu”, syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda dalam jual-beli.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), h.

³²Sahih Bukhari No. 2387, juz 4, h. 2074

³³Al-sayyid Sabiq. *Fiq al-Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: al-I'tisham, 2008), h. 248.

- 2) Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan dan Musta'ir yaitu orang yang menerima utang, syarat dari Mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat dari Mu'ir an Musta'ir adalah;
 - a) Baligh, maka batal Ariyah yang dilakukan anak kecil.
 - b) Berakal, maka batal Ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau gila.
 - c) Orang tersebut tidak diMahjur (dibawah curatelle), maka tidak sah Ariyah yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.
- 3) Benda yang di utangkan diisyaratkan yaitu;
 - a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang telah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - b) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis.

d. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang meminjami. Setiap hutang wajib dibayarkan, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayarkan

utang bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya dan dosa. Adapun jika melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman itu diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata dan tidak atas dasar perjanjian sebelumnya.

Beberapa Hukum Berkaitan dengan Al-Qard Dalam utang piutang Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengantulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.³⁴ Di samping adanya syarat rukun sahnya utangpiutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharganya.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000), h.

- 2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- 3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- 4) Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh. Disyari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi.

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.³⁵

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidakdidapatkan,

³⁵ Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) , 106

maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan. Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utangpiutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

e. Posisi Jaminan antara Utang piutang dan *Rahn* (Gadai)

Pada intinya gadai/rahn dilakukan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan piutang. Diakui atau tidak implementasi gadai baik secara tradisional maupun kelembagaan, konvensional maupun syariah, keseluruhannya menunjukkan adanya perbedaan bila ditinjau dari sisi prosedurnya yang harus dilakukan. Di samping itu juga perlu disadari bahwasanya gadai atau rahn dalam perspektif syariahpun juga mengindikasikan adanya perbedaan prosedur atau transaksi bila dibandingkan dengan rahn sebagai akibat dari adanya transaksi utang piutang. Yang demikian itu terjadi karena hadirnya lembaga pegadaian memiliki motivasi komersial sementara rahn sejak awal hanya diperuntukkan sebagai nilai kepercayaan badi mereka yang berutang-piutang.

Dengan kata lain rahn pada awalnya diproyeksikan sebagai instrument untuk mewujudkan tolong menolong sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sehari-hari debitur. Dengan kata lain dilakukannya transaksi gadai/ rahn semula dilaksanakan secara

tabarru' sebagai perwujudan pengabdian kepada Allah dalam bentuk tolong-menolong sesama yang tepatnya berupa pertolongan oleh orang yang memiliki surplus di bidang perekonomian terhadap orang lain yang mengalami devisa. Akan tetapi tolong menolong yang terkemas antara mereka yang dalam keadaan surplus dan yang devisa demi menutupi kebutuhan konsumtif tersebut berkembang dan berubah wajah baru karena dua hal, yaitu perubahan prinsip dari tabarru' (tolong-menolong semata) menjadi tijarah (komersial). Menelisik problematika ketiga entitas perilaku (gadai, rahn, dan utang piutang/qaradl) di atas perlu diuraikan terlebih dahulu prosedur atau mekanisme transaksi atau perjanjian masing-masing, agar diketahui titik simpul yang darinya akan diketahui kejelasan masing-masing.

Transaksi Utang-piutang dan Prosedurnya Tata cara perjanjian utang-piutang, secara tradisional, dari waktu ke waktu tidaklah sulit. Mereka yang mengalami devisa (membutuhkan bantuan piutang) cukup mengungkapkan kebutuhannya kepada mereka yang memiliki surplus keuangan dengan mengungkapkan berhutang sejumlah uang demi untuk menutupi kebutuhannya. Apabila orang yang memiliki surplus keuangan setuju memberikan piutang kepada yang devisa, maka selesailah persoalan. Yang tinggal hanyalah menunggu pengembalian piutang oleh yang berhutang kepada yang berpiutang (menghutangi) sejumlah piutang yang disepakati dan diterima oleh yang berhutang sesuai waktu yang

telah disepakati pula. Transaksi yang sangat sederhana tersebut tentu harus didukung oleh rasa percaya yang tinggi dari pihak yang berpiutang kepada yang berhutang, sementara yang berhutang harus memiliki i'tikad baik untuk mengembalikannya. Sehingga kepercayaannya ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan terjadinya akad atau transaksi utang-piutang.

Dengan kata lain, tidak adanya unsur kepercayaan, transaksi utang piutang mengalami kendala bahkan boleh jadi tidak jadi dilakukan. Padahal, sebagaimana asal hukum utang-piutang berdasarkan ulasan sebelumnya bisa jadi wajib sesuai illat (alasan) hukum yang mendasarinya, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan 26 asal perintah itu menunjukkan wajib, sekalipun secara eksplisit memberi hutang itu tidak secara langsung dalam bentuk amar. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia mengaitkan utang-piutang (qardl) dengan transaksi perbankan berdasarkan fatwa No: 19/DSN-MUI/IX/2000 yang dalam konsideran huruf (b) menyatakan: bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-qardl, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Menelisik prosedur atau tata cara transaksi atau akad utang-piutang sebagaimana disebutkan di atas, memang sangat mudah dan sederhana. Permasalahan muncul ketika unsur kepercayaan tidak terpenuhi. Sekalipun i'tikad baik dari pihak yang berhutang dapat dijamin, akan tetapi pihak yang berpiutang tetap saja tidak menaruh kepercayaan, di sinilah upaya utangpiutang mulai mengalami kesulitan. Akan tetapi berdasarkan hukum tentang utang-piutang sebagaimana ulasan dan dalil-dalil, serta regulasi sbagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, merekomendasikan bahwa hukum utangpiutang tetaplah sebagaimana illat hukumnya. Artinya transaksi utang-piutang tetap harus dijalankan sesuai illat hukumnya. Solusi terbaik agar utang-piutang tersebut tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan menutupi unsur kepercayaan tersebut dengan adanya jaminan yang dalam istilah fikih muamalah disebut rahn. Rahn ini berupa barang berharga yang diberikan oleh yang berhutang sebagai jaminan utangnya kepada yang berpiutang. Posisi barang jaminan atau rahn tersebut secara kepemilikan tetap menjadi milik yang berhutang sekalipun keberadaannya ada di tangan yang berpiutang.

Urgensi barang jaminan tersebut sebagai unsur pengganti kepercayaan si berpiutang yang apabila yang berhutang tidak mampu mengembalikan utangnya, dengan kesepakatan keduanya ketika melaksanakan akad atau transaksi, barang tersebut dijual dengan harga standar (pasar). Hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk

menutupi utang kepada yang berpiutang. Dengan cara ini akan melahirkan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, besaran hasil penjualan sama dengan besaran utang. Dalam kondisi seperti ini berarti urusan utang-piutang para pihak sudah dianggap selesai. Kemungkinan kedua adalah besaran hasil penjualan lebih besar dari besaran utang. Dalam kondisi seperti inipun sesungguhnya juga tidak ada masalah. Karena sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau transaksi dan penyerahan barang jaminan atau rahn, sisa uang hasil penjualan harus diserahkan kepada yang berhutang. Yang berpiutang sedikitpun tidak diperbolehkan mengambilnya.

Pengambilan sisa pembayaran utang dari hasil penjualan barang jaminan atau rahn oleh yang berpiutang bisa dikategorikan sebagai riba. Untuk itu seluruh sisa pembayaran utang harus dikembalikan kepada yang berhutang. Kecuali ada akad lain yang dibenarkan secara syariah atau hukum. Seperti ketika disepakati oleh para pihak sebagai upa dari jasa penjualan barang jaminan tersebut dengan besaran yang telah ditentukan dan disepakati.

Kemungkinan ketiga, adalah apabila hasil penjualan barang jaminan atau rahn tidak sebesar utang oleh yang berhutang. Dalam keadaan seperti ini aturan hukum yang harus dilakukan adalah bahwa yang berhutang wajib menambahi kekurangan utang yang menjadi kewajibannya. Dengan melakukan hal seperti ini, yaitu menambah

kekurangan utang kepada yang berpiutang berarti akad utang-piutang antar para pihak sudah selsai dan dianggap sah demi hukum. Dari prosedur atau tata cara utang-piutang yang melahirkan kemungkinankemungkinan di atas sesungguhnya masih ada sesuatu atau langkah yang apabila dilakukan akan menjadi lebih baik dan terpuji. Sesuatu atau langkah yang dianggap terpuji tersebut adalah apabila yang berpiutang membebaskan beban utang yang berhutang. Pembebasan utang tersebut merupakan sedekah bagi yang berpiutang terhadap yang berhutang.

Berdasarkan hasil analisa atau pembahasan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa posisi jaminan antara utang-piutang dan rahn atau gadai sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun keduanya tetap menjadi akad atau perjanjian yang bersifat asessorir. Pada utang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak. Ia diadakan ketika unsur kepercayaan tidak. Sedangkan posisi jaminan pada rahn atau gadai memang dibutuhkan secara mutlak dan keberadaannya harus di depan sebelum akad utang-piutang atau kredit dilaksanakan. Tidak adanya jaminan utang-piutang atau kredit utang-piutang tidak mungkin bisa dilaksanakan.

B. Tinjauan Pustaka

Untuk membedakan dengan penelitian lain maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu seperti :

1. Iqbal Rizal di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Kebun Cengkeh Di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana praktek gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman. Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan pelaksanaan gadai kebun cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali yang dilakukan penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*martahin*) bertentangan dengan hukum Islam karena; Pertama, terdapat unsur paksaan di dalamnya, yaitu apabila *rahin* tidak berkenan memberikan hasil kebun cengkehnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* tidak akan bersedia memberikan pinjaman kepada *rahin*. Kedua, adanya unsur riba di dalamnya yaitu *murtahin* mengambil keuntungan yang melampaui batas terhadap *rahin*. Ketiga, pemanfaatan barang jaminan (*marhun*), yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin*, seharusnya *murtahin* hanya boleh mengambil manfaatnya tersebut sebatas biaya rawat dan operasional apabila kebun cengkeh tersebut memang membutuhkan biaya tersebut. *Murtahin* dalam memanfaatkan *marhun* juga tidak ada bagi hasil dengan penggadai (*rahin*). Pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena masih terdapat unsur

pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan pada hakikatnya kebun cengkeh tersebut masih milik *rahin*.

2. Ihwan Azis di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana praktek gadai tanah sawah tanpa batas waktu di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemanfaatan gadai tanah sawah tanpa batas waktu di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam. Ketidaksahan akad terjadi pada sighat akad yang tidak menentukan sampai kapan waktu gadainya. Mengenai pemanfaatan tanah sawah tanpa batas waktu oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut hukum Islam tidak sah. Karena adanya unsur eksploitasi dari pihak penerima gadai, serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatik.
3. Isti'anah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal. Permasalahan

skripsi ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni mengkaji data yang ada di masyarakat Desa Harjawinangun kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Islam. Dan teknik pengumpulan datanya adalah *interview*, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari informan secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. *Interview* adalah untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan. Agar wawancara ini lebih valid penyusun juga mewawancarai tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat.. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai dan penerima gadai yang ada di Desa Harjawinangun yang berjumlah 14 informan, masing-masing 7 informan dari penggadai dan 7 dari penerima gadai. Sedangkan sampelnya yang digunakan adalah *simple random* yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan obyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan

mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh *murtahin* baik secara hukum Islam maupun Adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.

4. Hendra Nirwansyah di UIN Alauddin Makassar dengan judul Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanuan dan Bagaimana Tinjaua Hukum Islam Terkait Pengelolaan Gadai Sawah di Kecamatan Pitumpanua. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat Kecamatan, penggadai dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumendokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo ada dua yang pertama memang niatnya

ingin membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadikan si Rahin, sedangkan menurut para ulama, Hanafiah “yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena berada pada kekuasaan si penerima gadai, sedangkan Imam syafi’I dan Imam Malik yang berhak adalah sipenggadai, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hamper sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, Tetapi harus memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi.